



RENCANA STRATEGIS

BALAI GTK PROVINSI MALUKU

2025 – 2029

(REVISI)





KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan revisi Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku dalam mendukung agenda pembangunan Nasional di bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada berbagai regulasi di bidang pendidikan dan sebagai upaya Balai GTK Provinsi Maluku merumuskan arah pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang relevan dengan karakteristik geografis wilayah kepulauan, dinamika sosial budaya, serta kebutuhan nyata satuan pendidikan di masing-masing kabupaten/kota.

Penyusunan Renstra Revisi BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, dan prioritas pembangunan pendidikan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, target kinerja, arah kebijakan, dan strategi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Maluku selama lima tahun ke depan yang diselaraskan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029. Semoga Renstra Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dapat menjadi rujukan bersama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkontribusi nyata bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.



Ambon, Juni 2026

Kepala,

Eky Arisanto P. Punu, SE., MM
NIP. 197004162003121001



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A Kondisi Umum	1
B Potensi dan Permasalahan	15
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	21
A Visi	21
B Misi	22
C Tujuan	23
D Sasaran Kegiatan	25
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	27
A Arah Kebijakan dan Strategi	27
B Kerangka Regulasi	31
C Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	35
A Target Kinerja	35
B Kerangka Pendanaan	37
BAB V Penutup	39
Lampiran-Lampiran	40



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. SK dan IKK Renstra BGP Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024.....	6
Tabel 1.2 Rincian Capaian Kinerja BGP Provinsi Maluku Periode Renstra Tahun 2020 – 2024	7
Tabel 1.3 Sebaran Data Guru di Provinsi Maluku.....	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Balai GTK Provinsi Maluku.....	24
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Kinerja (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai GTK Provinsi Maluku.....	25
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikasi Resiko.....	26
Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Dirjen GTK Kemendikdasmen.....	29
Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai GTK Provinsi Maluku	30
Tabel 4.1 Target Kinerja Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.....	35
Tabel 4.2 Keterkaitan Sasaran Kegiatan BGTK Provinsi Maluku dengan Prioritas Kemendikdasmen dan Program Ditjen GTK.....	36
Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 (dalam ribuan rupiah).....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Maluku.....	4
Gambar 1.2 Data Kualifikasi Akademik Guru di Maluku.....	12
Gambar 1.3 Data Sertifikasi Guru di Maluku.....	12
Gambar 3.1 Struktural Organisasi Balai GTK Provinsi Maluku.....	32
Gambar 3.2 Komposisi Pegawai BGTK Maluku Tahun 2025.....	33



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Guru Peserta PGP Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2024.....	9
Grafik 1.2 Perkembangan Literasi Provinsi Maluku Tahun 2025.....	13
Grafik 1.3 Perkembangan Numerasi Provinsi Maluku Tahun 2025.....	13
Grafik 1.4 Kualitas Pembelajaran Provinsi Maluku Tahun 2025.....	14
Grafik 1.5 Capaian Kinerja BGTK Maluku Tahun 2024.....	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan pendidikan nasional dalam periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola pendidikan, serta relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pembangunan nasional. Arah kebijakan nasional ini sejalan dengan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia, riset, teknologi, pendidikan, kebudayaan, dan tata kelola sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, fokus kebijakan diarahkan pada percepatan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK), serta pendalaman implementasi kurikulum yang adaptif dan kontekstual. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku memiliki mandat strategis dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas tersebut.

Balai GTK Provinsi Maluku bertugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025. Peran ini menjadi semakin penting mengingat karakteristik geografis Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari lebih dari seribu pulau, dan lebih dari 70% wilayah berupa lautan. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan, distribusi guru, akses pelatihan, serta pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi GTK.

Berdasarkan Rapor Pendidikan Provinsi Maluku Tahun 2025, capaian literasi dan numerasi masih menunjukkan disparitas antarwilayah. Sejumlah satuan pendidikan, terutama di wilayah 3T, menghadapi kesulitan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, pengelolaan kelas inklusif, serta penguatan karakter peserta didik. Selain itu, data Dapodik 2025 menunjukkan bahwa distribusi guru pada beberapa jenjang dan mata pelajaran masih belum merata, terutama pada wilayah-wilayah seperti Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Tanimbar.

Kondisi ini semakin mempertegas bahwa pemerataan kompetensi dan kualitas guru menjadi tantangan tambahan. Balai GTK Provinsi Maluku juga diperhadapkan dengan



masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D-IV, dan masih banyak guru belum bersertifikat pendidik. Sesuai data Ditjen GTK tahun 2024 yang menunjukkan bahwa tidak kurang 30% guru Maluku belum memiliki sertifikat pendidik antara lain karena belum memenuhi kualifikasi akademin S1/D-IV terutama guru – guru yang bertugas pada daerah 3T selain karena terbatasnya sarana dan akses informasi terkait sumber/bahan ajar yang aktual. Hal ini diyakini memiliki implikasi pada kualitas pembelajaran, pemahaman kurikulum, serta kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan kebijakan dan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini.

Dalam hal ini, peran Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan kompetensi termasuk pengembangan model pelatihan, supervisi pengembangan profesi berkelanjutan, pemetaan kompetensi, hingga kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, menjadi sangat penting dan strategis, terutama ketika dikaitkan dengan karakteristik geografis Provinsi Maluku. Dalam konteks lokal, Maluku memiliki kekayaan budaya yang sangat relevan dalam penguatan pembelajaran kontekstual, seperti nilai-nilai Sasi, Pela Gandong, Ale Rasa Beta Rasa, Masohi, Maren, hingga tradisi lisan Kapata. Kearifan lokal ini menjadi potensi strategis untuk memperkaya proses pembelajaran dan membangun karakter peserta didik.

Dengan mempertimbangkan tantangan wilayah, kondisi GTK, mandat regulasi, serta arah kebijakan nasional, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan arah strategis lima tahunan dalam pengembangan dan pemberdayaan GTK secara sistematis, tepat sasaran, dan berbasis data. Renstra ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai GTK Provinsi Maluku, sekaligus memastikan tercapainya layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Dokumen Renstra revisi ini disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku, data Rapor Pendidikan, Data GTK Provinsi Maluku, serta kebijakan strategis Kemendikdasmen. Penyusunan Renstra Revisi BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, dan prioritas pembangunan pendidikan. Dengan demikian, Renstra Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang mampu mengarahkan program, kegiatan, dan strategi peningkatan kompetensi GTK secara menyeluruh guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.



Gambaran Balai GTK Provinsi Maluku

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Sesuai regulasi tersebut, Balai GTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan melalui penyelenggaraan layanan peningkatan kompetensi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Secara organisatoris, Balai GTK Provinsi Maluku merupakan satuan kerja unit pelaksana teknis setingkat eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG). Balai GTK Provinsi Maluku merupakan kelanjutan dan penguatan mandat kelembagaan dari transformasi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Provinsi Maluku yang sebelumnya bertransformasi menjadi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Maluku berdasarkan Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022. Transformasi kelembagaan ini menegaskan reposisi peran balai dari fokus layanan PAUD dan pendidikan nonformal, menjadi pusat pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Maluku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku menyelenggarakan berbagai fungsi strategis, antara lain: pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pengembangan model peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah; fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan; supervisi dan pemantauan pengembangan profesi berkelanjutan; serta penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, lembaga adat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, serta pengembangan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Dari sisi tata kelola, Balai GTK Provinsi Maluku terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Capaian kinerja yang ditunjukkan melalui perolehan predikat sangat baik dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan tingginya nilai kinerja anggaran menunjukkan



kompleksnya tantangan Balai GTK Provinsi Maluku yang berkedudukan di Ambon untuk menjangkau guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di kota/kabupaten dan bahkan di pulau-pulau terluar. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi serta kondisi alam dan cuaca ekstrim yang dapat berubah setiap saat, diyakni sangat berkorelasi dengan fakta adanya disparitas kompetensi dan ketersediaan guru antardaerah, kondisi sosial budaya dan kondisi keamanan yang dapat berubah setiap saat, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penyediaan layanan untuk GTK.

Keterbatasan pilihan transportasi umum juga merupakan tantangan sekaligus hambatan bagi Balai GTK untuk menyukseskan implementasi kebijakan pendidikan bermutu untuk semua sesuai visi menteri pendidikan dasar dan menengah. Misalnya, wilayah kepulauan seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Tanimbar, tidak cukup dengan hanya sebatas membutuhkan pendekatan layanan pengembangan kompetensi yang adaptif dan inovatif tapi juga membutuhkan biaya tinggi, dan waktu tempuh yang relatif lama.

Kondisi daerah kepulauan yang hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi laut juga tidak hanya membutuhkan fisik yang prima bagi pegawai yang ditugaskan pada daerah tersebut dan guru yang akan diundang untuk mengikuti kegiatan, namun seringkali diperhadapkan dengan biaya transportasi juga sangat tinggi (tidak sesuai dengan SBM). Sebagai perbandingan biaya untuk perjalanan dinas kegiatan untuk 1 orang guru pada kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru setara dengan biaya perjalanan dinas untuk 30 sampai dengan 50 orang guru Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, bahkan Kabupaten Seram Bagian Barat. Biaya perjalanan dinas untuk 1 guru dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual dapat setara dengan Biaya perjalanan dinas 10 sampai dengan 20 orang guru dari kota Ambon.

Dalam konteks ini, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku diharapkan mampu menghadirkan berbagai program dan inovasi dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan kompetensi GTK terutama untuk menjangkau wilayah 3T dan memanfaatkan teknologi serta mekanisme pembelajaran berbasis komunitas untuk memastikan pemerataan kualitas GTK. Keadaan ini menunjukkan perlunya inovasi strategi peningkatan kompetensi guru yang lebih sistematis, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan, sekaligus penguatan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal agar lebih relevan dengan karakter masyarakat Maluku. Kekayaan budaya seperti Sasi, Pela Gandong, Hidup Orang Basudara, Ale Rasa Beta Rasa, Maren, Masohi, serta tradisi lisan Kapata merupakan



sumber belajar yang bernilai, namun keberagaman budaya tersebut juga dapat memicu gesekan bahkan konflik di ruang kelas ketika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku telah menginisiasi penyusunan modul ajar guna meningkatkan kompetensi guru dalam mencegah, meminimalkan, dan menangani potensi konflik yang muncul dalam proses pembelajaran.

Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku yang sebelumnya pada tahun 2022 – 2024 bernama Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, telah menuntaskan seluruh target capaian pada Rencana Strategi periode 2022-2024. Adapun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku pada periode Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai berikut

Tabel 1.1
SK dan IKK Renstra BGP Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.1	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan						
IKK 1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	-	-	816	1.088	2.176
IKK 1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan	Orang	-	-	3.251	3.251	6.019
IKK 1.3	Jumlah guru yang mengikuti program Pendidikan kepemimpinan sekolah model Baru	Orang	-	-	217	271	271
SK.2	Meningkatnya Tata Kelola Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku						
IKK 2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Maluku	Nilai	-	-	-	BB	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Maluku	Predikat	-	-	80	95	92

Sumber: Perubahan Renstra BGP Provinsi Maluku (12 Februari 2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas yang dihimpun melalui dokumen Perubahan Renstra Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, terdapat 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). SK dan IKK tersebut dituntaskan pada tahun anggaran 2022 hingga 2024. Sedangkan capaian kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku atas target di atas sebagaimana Tabel 1.2 berikut:



Tabel 1.2
Rincian Capaian Kinerja BGP Provinsi Maluku
Renstra Tahun 2020 – 2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Kegiatan	Target Renstra 2020-2024	Total Realisasi 2020-2024	Persentase Ketercapaian 2020-2024
SK.1	Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan			
IKK 1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	4.080	4.455	109.19%
IKK 1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan	12.521	19.420	155.09%
IKK 1.3	Jumlah guru yang mengikuti program Pendidikan kepemimpinan sekolah model Baru	759	970	127,80%
		17.360	24.845	143.11%
SK.2	Meningkatnya Tata Kelola Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku			
IKK 2.1	Predikat SAKIP BGP Provinsi Maluku	A (80.55)	A (82)	101.80%
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Maluku	89	93.78	105.37%

Berdasarkan capaian kinerja Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Maluku selama periode Renstra 2020–2024, secara umum seluruh indikator kinerja kegiatan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan tata kelola organisasi telah berjalan secara efektif.

1. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan merupakan sasaran strategis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pengembangan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Dalam ketercapaian jumlah guru dan Tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru diimplementasikan melalui pengembangan Program Sekolah Penggerak (PSP)

Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan program transformasi satuan pendidikan melalui intervensi yang terintegrasi pada aspek kepemimpinan sekolah, peningkatan kompetensi pendidik, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta penguatan ekosistem pendidikan. Implementasi PSP selama periode 2020-2024 melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, antara lain refleksi satuan pendidikan,



pendampingan sekolah, coaching bagi pengawas sekolah, lokakarya kurikulum, lokakarya komunitas belajar, lokakarya kepemimpinan, lokakarya pembelajaran dan asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), disiplin positif, pelatihan komite pembelajaran, serta perencanaan berbasis data. Rangkaian kegiatan tersebut berkontribusi dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan instruksional, budaya reflektif, dan praktik pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

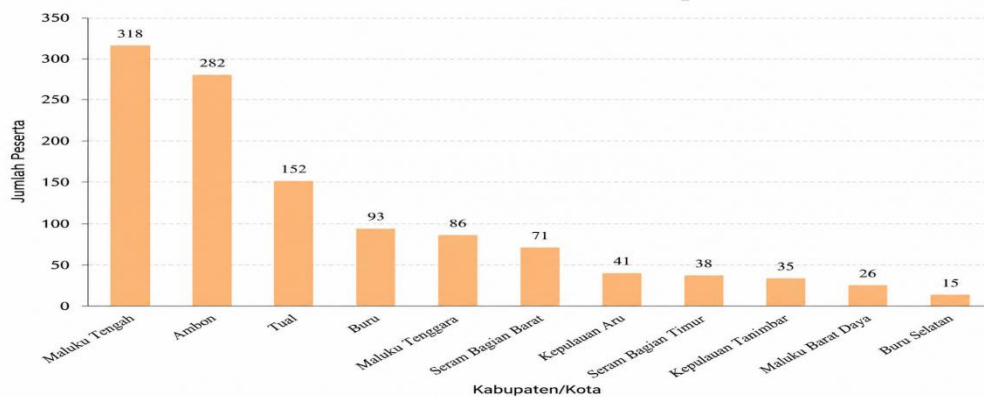
Penguatan kompetensi juga dilakukan untuk pencapaian jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran melalui pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, ataupun penguatan/ pendampingan komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Peranan Komunitas Belajar dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sangat urgensial dalam mendukung guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran.

Selain itu pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai instrumen pengembangan profesional berbasis teknologi yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang menyediakan berbagai layanan pengembangan kompetensi, meliputi pelatihan mandiri, perangkat ajar, asesmen pembelajaran, pengelolaan kinerja, berbagi praktik baik, serta penguatan komunitas belajar. Pemanfaatan platform tersebut memungkinkan guru memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber belajar dan jejaring profesional, sehingga mendorong terwujudnya budaya belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) dan kolaborasi antarpendidik. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 9.027 guru dari jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK di Provinsi Maluku tercatat berada pada kategori baik dalam pemanfaatan PMM.

Kegiatan strategis lainnya guna pencapaian jumlah guru yang mengikuti pendidikan kepemimpinan sekolah model baru yakni Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang berorientasi pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan penguatan kapasitas guru sebagai agen perubahan di satuan pendidikan. Pelaksanaan PGP di Provinsi Maluku mencakup PGP Reguler Angkatan 4, 6 hingga 11 dan PGP Daerah Khusus (Dasus) Angkatan 9 dan 10.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pembelajaran, pendampingan individu, lokakarya kolaboratif, praktik perubahan di sekolah, serta refleksi pembelajaran berbasis pengalaman. Selama periode 2020-2024, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 1.157 guru yang tersebar pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Grafik 1.1. Jumlah Guru Peserta PGP Provinsi Maluku sampai Tahun 2024



Sumber : Lakin BGP Maluku, 2024 (data diolah)

Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan periode 2020–2024 di Provinsi Maluku secara keseluruhan, telah berjalan efektif dalam mendukung transformasi pendidikan. Peningkatan kapasitas profesional dan kepemimpinan guru ini didorong keberhasilan Program Sekolah Penggerak, Platform Merdeka Mengajar, komunitas belajar, serta Pendidikan Guru Penggerak. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada mutu pendidikan yang berkelanjutan.

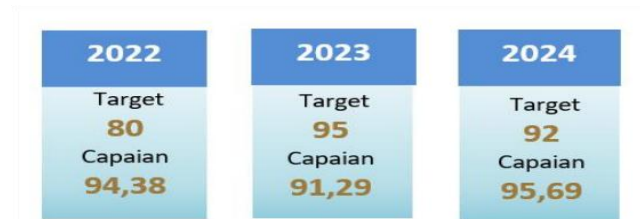
2. Peningkatan Tata Kelola Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku

Peningkatan tata kelola BGP Provinsi Maluku periode 2020–2024 diwujudkan melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan peningkatan kinerja anggaran pelaksanaan RKA-KL. SAKIP mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan kinerja guna mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Target perencanaan periode 2020–2024 berhasil dicapai dengan diraihnya predikat SAKIP A pada tahun 2023 dan 2024.

Pencapaian kinerja ini didukung melalui penyusunan LAKIN, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, reviu Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan, serta pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP. Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui optimalisasi sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar tim kerja, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai upaya tersebut berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas organisasi dan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung transformasi pendidikan di Provinsi Maluku.

Disisi lain Nilai Kinerja Anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Kinerja anggaran BGP Provinsi Maluku tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya.



Sumber : Lakin BGP Provinsi Maluku, 2024

Pencapaian nilai kinerja anggaran hingga tahun 2024 guna memenuhi target yang ditentukan dilakukan dengan strategi pelaksanaan antara lain :(1) monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kegiatan secara berkala guna optimalisasi pencapaian kinerja balai, (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran tersedia untuk mendukung pencapaian indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna akselerasi penyerapan anggaran/ kegiatan balai, (3) Penataan dalam Implementasi kegiatan balai sesuai prioritas kegiatan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan, (4) evaluasi tingkat balai secara berkala dan reguler perbulan maupun triwulan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian realisasi anggran/daya serap.sehingga menunjang ketercapaian output kegiatan.

Kondisi Umum Pendidikan Maluku

Kondisi umum pendidikan di Provinsi Maluku dipengaruhi karakteristik geografis kepulauan, keberagaman sosial-budaya, serta kualitas sumber daya manusia pendidik yang terus berkembang. Sebagai wilayah dengan 1.340 pulau dan lebih dari 90% wilayah berupa perairan, penyelenggaraan layanan pendidikan di Maluku menghadapi tantangan akses, pemerataan kualitas, serta pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Selain itu pengembangan dan pemberdayaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor kunci dalam memperkuat mutu pembelajaran. Dalam hal ini, pemerataan kompetensi GTK adalah bagian dari tugas utama Balai GTK meskipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan, terutama untuk wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Guru di Maluku tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, hingga pembentuk karakter peserta didik. Tuntutan pembelajaran abad ke-21 mengharuskan guru memiliki kemampuan adaptif, kreatif, dan inovatif agar dapat merancang pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan peserta didik, serta konteks lokal yang menjadi ciri khas



wilayah Maluku. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM guru dan tenaga kependidikan menjadi kunci dalam mendukung transformasi pembelajaran yang bermakna dan berdampak.

Berdasarkan Data Guru Provinsi Maluku 2025 (*Dapodik 2025*), terlihat bahwa sebaran guru di Provinsi Maluku masih menunjukkan ketimpangan antardaerah. Wilayah-wilayah seperti Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Tanimbar masih menghadapi keterbatasan jumlah guru pada jenjang tertentu, terutama mata pelajaran sains, matematika, dan guru pendidikan khusus. Sementara itu, wilayah seperti Kota Ambon dan sebagian Seram Bagian Barat relatif memiliki ketersediaan guru yang lebih memadai. Ketimpangan ini berdampak pada proses pembelajaran, mutu layanan pendidikan, dan capaian hasil belajar murid.

Status kepegawaian guru menjadi isu penting di Maluku, karena sebagian masih berstatus non-ASN, baik guru honor daerah maupun guru yang diangkat oleh sekolah swasta, yang perannya sangat vital di wilayah terpencil yang kekurangan guru ASN. Namun, kesejahteraan, kepastian status, dan kesempatan pengembangan profesi bagi guru non-ASN masih belum merata. Oleh karena itu, perlu memandang ekosistem guru secara lebih inklusif, mencakup tidak hanya guru ASN tetapi juga guru non-ASN yang menjalankan tugas pedagogik secara profesional.

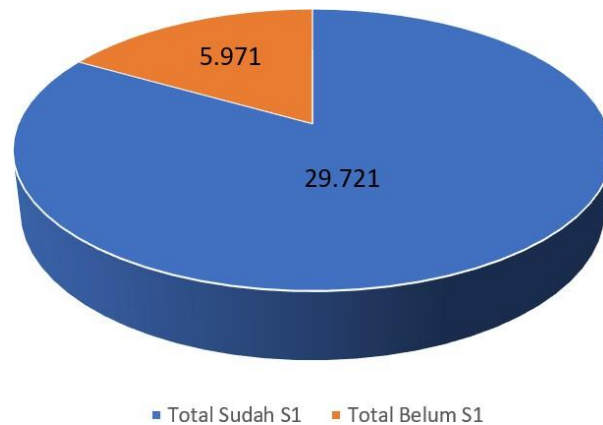
Tabel 1.3 Sebaran Data Guru di Provinsi Maluku

No	Wilayah	Total	TK	KB	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Maluku Tengah	8,501	464	188	27	11	3,829	1,927	1,735	293	21
2	Kota Ambon	5,751	208	229	55	26	2,197	1,214	1,06	686	58
3	Kab. Seram Bagian Barat	4,651	160	228	18	0	1,879	1,12	884	331	28
4	Kab. Seram Bagian Timur	3,713	426	79	6	0	1,842	855	354	151	0
5	Kab. Buru	3,432	173	226	8	8	1,438	883	397	271	10
6	Kab. Kepulauan Tanimbar	3,351	210	47	47	0	1,186	1,143	483	222	12
7	Kab. Buru Selatan	2,936	219	133	22	9	1,273	865	251	157	7
8	Kab. Maluku Barat Daya	2,849	311	52	4	0	1,1	837	381	161	0
9	Kab. Maluku Tenggara	2,661	72	285	26	6	958	731	361	191	9
10	Kab. Kepulauan Aru	2,348	52	141	3	9	1,017	677	279	134	9
11	Kota Tual	1,782	60	107	0	5	732	491	248	102	12
Total		41,975	2,355	1,715	216	74	17,451	10,743	6,433	2,699	166

Sumber: *Dapodik Kemendikdasmen 2025*

Kualifikasi akademik guru di Provinsi Maluku masih terdapat guru yang belum memenuhi standar minimal S1 atau D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Hal ini menjadi tantangan mendasar dalam optimalisasi program peningkatan kompetensi berkelanjutan, karena kualifikasi akademik merupakan prasyarat penting bagi penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru.

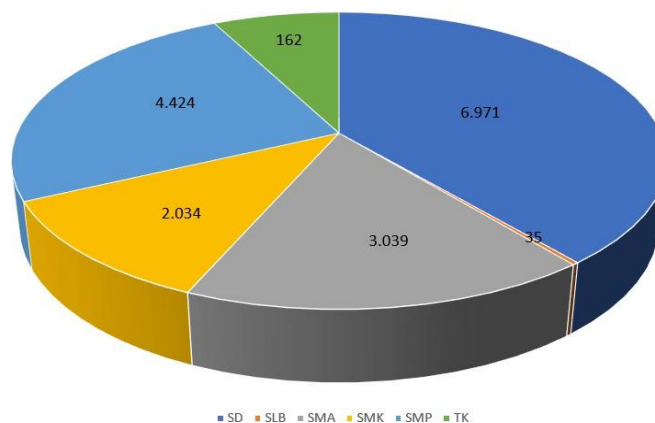
Gambar 1.2 Data Kualifikasi Akademik Guru di Maluku



Berdasarkan data kualifikasi pendidikan tersebut, terlihat bahwa pemenuhan kualifikasi akademik akan sangat berpengaruh terhadap kesempatan guru untuk memperoleh sertifikasi pendidik. Guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV otomatis tidak dapat mengikuti Sertifikasi Guru, yang merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap profesionalitas sekaligus jalur peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Dengan demikian, peningkatan kualifikasi akademik menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan. Kualifikasi yang belum optimal juga berdampak pada kemampuan guru memahami kurikulum, merancang pembelajaran mendalam, dan menerapkan metode mengajar yang berpusat pada murid. Berikut adalah data Sertifikasi Guru di Provinsi Maluku:

Gambar 1.3 Data Sertifikasi Guru di Maluku

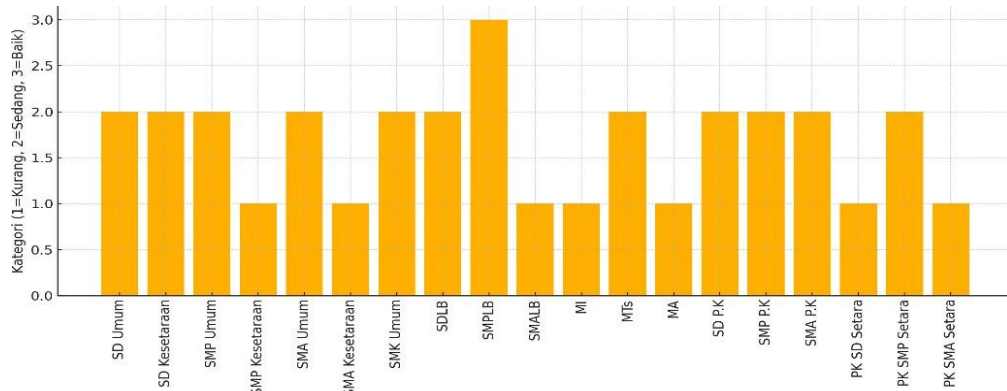
Guru Belum Sertifikas 19.155 dari 35.692 Guru



Kualitas pembelajaran di Provinsi Maluku tergambar dalam Rapor Pendidikan Indonesia 2025 untuk Provinsi Maluku, yang menunjukkan bahwa capaian pada indikator literasi dan numerasi masih berada pada kategori *sedang* hingga *kurang* pada beberapa jenjang pendidikan. Misalnya, capaian literasi pada jenjang SD umum berada pada kategori *sedang*, sementara literasi SMP Kesetaraan berada pada kategori *kurang*. Kondisi ini menunjukkan

bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam membangun kemampuan membaca, menalar, dan memecahkan masalah pada peserta didik sejak tahap awal pendidikan.

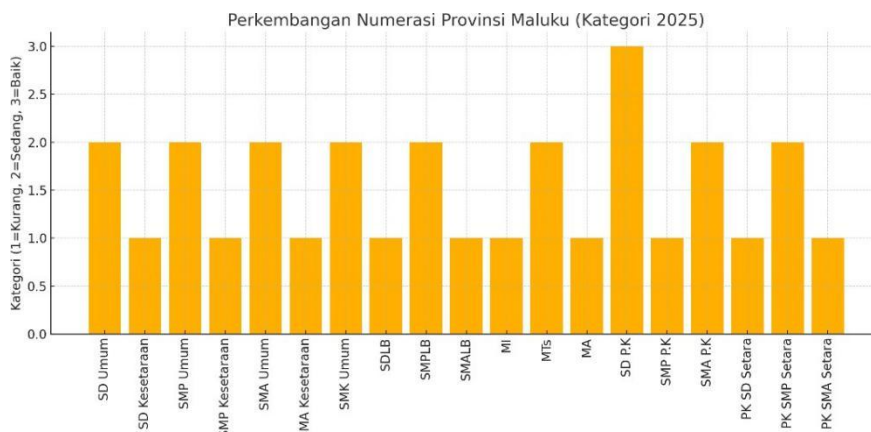
Grafik 1.2 Perkembangan Literasi Provinsi Maluku Tahun 2025



Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Maluku 2025

Capaian numerasi tahun 2025 menunjukkan pola yang serupa, di mana beberapa jenjang masih berada pada kategori *kurang* dan membutuhkan intervensi pembelajaran yang lebih efektif. Rendahnya kemampuan numerasi pada jenjang tertentu juga menunjukkan perlunya penataan kembali strategi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru matematika, serta penguatan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid secara berkelanjutan.

Grafik 1.3 Perkembangan Numerasi Provinsi Maluku Tahun 2025

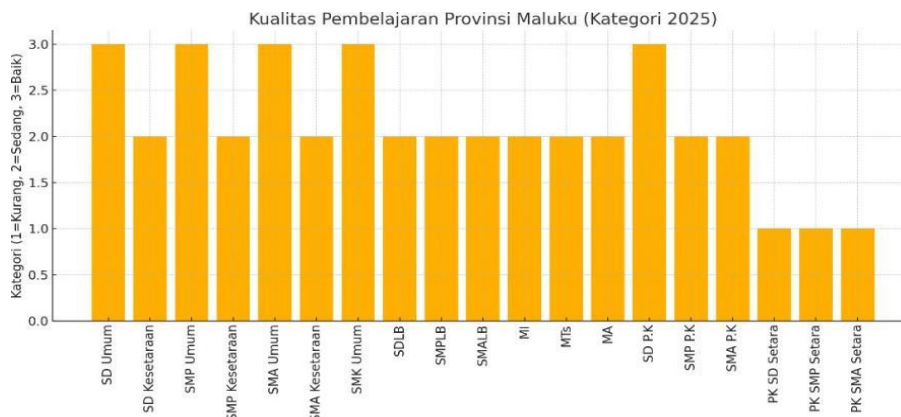


Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Maluku 2025

Kualitas pembelajaran di Provinsi Maluku pada Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan kondisi yang mulai membaik, meskipun variasinya masih terlihat antarjenjang. Sejumlah jenjang seperti SD Umum, SMP Umum, SMA Umum, SMK Umum, serta SD Pendidikan Keagamaan telah berada pada kategori Baik, yang mencerminkan suasana kelas yang sudah kondusif, dukungan psikologis yang optimal, serta pembentukan pemahaman dari guru yang berjalan efektif. Namun, sebagian besar satuan pendidikan masih berada pada kategori

Sedang, yang berarti pembelajaran sudah mengarah ke praktik yang positif tetapi belum sepenuhnya stabil atau merata. Perlunya intervensi yang lebih terarah terkait dukungan psikologis, pengelolaan kelas, serta strategi pembelajaran untuk memastikan seluruh murid memperoleh pengalaman belajar yang aman, inklusif, dan mendorong pemahaman yang mendalam.

Grafik 1.4 Kualitas Pembelajaran Provinsi Maluku Tahun 2025



Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Maluku 2025

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku perlu merespons keadaan ini dengan memperkuat kapasitas guru dalam memberikan pembelajaran yang relevan, mendorong motivasi belajar, dan mendukung upaya satuan pendidikan dalam menekan angka putus sekolah. Implementasi pendidikan bermutu untuk semua memberikan peluang besar untuk memanfaatkan konteks lokal sebagai bagian dari pengalaman belajar murid.

Tata kelola Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan pelatihan, pengembangan komunitas belajar, pendampingan guru dalam implementasi kurikulum, serta penyediaan dukungan teknis lainnya.

Secara keseluruhan, kondisi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku mencerminkan tantangan sekaligus peluang besar untuk melakukan transformasi pendidikan bermutu untuk semua. Karakteristik wilayah kepulauan memerlukan strategi intervensi yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan. Oleh karena itu, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku memiliki peran sebagai pusat peningkatan kompetensi guru yang tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menjadi mitra strategis satuan pendidikan dalam memperkuat proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.



B. Potensi dan Permasalahan

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku memiliki tugas dan fungsi pada bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Terkait dengan hal ini maka dalam renstra Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 akan mengetengahkan analisa permasalahan dan tantangan serta potensi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, khususnya yang terkait dengan peningkatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas guru

Adapun Potensi terwujudnya peningkatan kualitas guru sebagai berikut:

(1) Komitmen Nasional terhadap Peningkatan Mutu Guru

Adanya arah kebijakan Renstra Kemendikdasmen 2025–2029 yang menempatkan peningkatan kapasitas guru sebagai prioritas nasional, termasuk penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

(2) Ketersediaan Program Pengembangan Keprofesian

Tersedianya berbagai pelatihan, workshop, seminar, pendampingan, komunitas belajar, serta pelatihan berbasis kebutuhan (*Training Need Assessment*) yang dapat mengakselerasi peningkatan kompetensi guru.

(3) Peningkatan Akses Sertifikasi dan PPG

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi profesi menunjukkan tren peningkatan fasilitasi dan dukungan pemerintah, sehingga mendorong profesionalisasi pendidik.

(4) Perkembangan Kurikulum Pengembangan Profesi

Pembaruan kurikulum pengembangan profesi yang mencakup literasi, numerasi, pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, dan pendampingan pembelajaran menjadi peluang untuk meningkatkan relevansi kompetensi guru di masa depan.

(5) Peningkatan Jenjang Karir Guru

Data Kemendikdasmen menunjukkan meningkatnya fasilitasi kenaikan jenjang karir guru PAUD, Dikdas, dan Dikmen, yang memberi motivasi dan penghargaan terhadap kinerja guru.



Identifikasi Permasalahan yang timbul, antara lain:

(1) Kualifikasi dan Kompetensi Guru yang Belum Merata

Masih banyak guru di Maluku yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D-IV sehingga tidak dapat mengikuti sertifikasi guru, yang berdampak pada pengakuan profesional dan kesejahteraan.

(2) Mutu dan Kesiapan Guru Masih Rendah

Pemahaman kurikulum, keterampilan pedagogik, inovasi pembelajaran, serta kemampuan memahami karakteristik peserta didik masih belum optimal sehingga memengaruhi kualitas pembelajaran.

(3) Ketimpangan Capaian Pembelajaran Siswa

Ketimpangan hasil literasi, numerasi, dan karakter menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas guru dan penerapan model pembelajaran yang lebih relevan dengan konteks lokal.

(4) Dukungan Psikologis dan Kompetensi Pedagogis yang Belum Optimal

Guru masih membutuhkan penguatan dalam aspek psikologis, sosial, dan manajemen kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang aman dan bermakna.

(5) Pelatihan Belum Seluruhnya Berbasis Kebutuhan

Tidak semua pelatihan disusun berdasarkan analisis kebutuhan aktual sehingga kurang berdampak langsung pada peningkatan kompetensi guru.

(6) Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Masih Terbatas

Kesiapan guru dalam literasi digital, penguasaan teknologi, koding, dan AI masih belum merata, padahal menjadi tuntutan pembelajaran abad ke-21.

2. Kondisi Geografis Wilayah

Selain permasalahan terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan di Maluku dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi balai maka ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni Kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai wilayah kerja Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku merupakan wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 km². Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294,69 km² (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.185 km² (7,6%). Adapun potensi geografis wilayah Maluku adalah:

- (1) Kemajuan teknologi (Revolusi Industri 4.0) membuka peluang pemanfaatan pembelajaran digital, multimedia, AI, dan koding untuk meningkatkan mutu guru dan memperluas layanan pelatihan hingga ke daerah terpencil.



- (2) Komitmen nasional melalui Renstra Kemendikdasmen 2025–2029 memberikan arah kebijakan yang kuat dalam peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan karier guru secara sistematis dan berkelanjutan.
- (3) Capaian Reformasi Birokrasi di Balai GTK Provinsi Maluku, seperti predikat SAKIP “A”, kinerja anggaran yang sangat baik, serta capaian pelatihan yang melampaui target, menunjukkan kesiapan organisasi dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (4) Pembaruan kurikulum pengembangan profesi guru yang mencakup literasi, numerasi, pembelajaran mendalam, teknologi, koding, AI, dan kepemimpinan sekolah, menjadi peluang meningkatkan relevansi kompetensi guru dengan kebutuhan masa depan.
- (5) Penerapan otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi penguatan GTK yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk pemetaan kebutuhan pelatihan, penataan guru, dan penguatan kepemimpinan sekolah.
- (6) Keragaman Budaya di kepulauan Maluku menjadi potensi penguatan pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal, serta peluang memperluas jejaring komunitas belajar guru.

Kompleksitas masalah pendidikan dan tata kelola guru tersebut membutuhkan identifikasi potensi internal maupun eksternal untuk mendukung penyelesaiannya di Provinsi Maluku sebagai wilayah kerja UPT Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku. Beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

a. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan pendidikan. Perkembangan teknologi mempercepat penggunaan multimedia dan alternatif pembelajaran non-tatap muka, serta mendorong pengelolaan pendidikan yang lebih modern. Kemajuan ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pelayanan pendidikan serta mutu guru.

Guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tren kemajuan teknologi yang terus berkembang tidak dapat dihindari, sehingga pemanfaatan teknologi untuk penguasaan materi, pengayaan pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru akan terus menjadi kebutuhan mendesak.



b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan secara sistematis, terpadu, dan menyeluruh pada seluruh lini organisasi, mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi ditempatkan sebagai fondasi untuk mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam memberikan layanan pendidikan yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pentingnya transformasi kultur kerja, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan kapasitas aparatur negara agar memiliki kompetensi unggul baik secara teknis maupun nonteknis.

Perbaikan tata kelola ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan birokrasi yang mengurangi kualitas layanan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan agenda tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan indikator Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari indikator kinerja utama Renstra. Indikator tersebut mencakup:

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Sistem Merit
3. Indeks Pelayanan Publik
4. Indeks Reformasi Hukum
5. implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
6. Opini BPK atas laporan keuangan.

Capaian kinerja Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2024 menunjukkan kontribusi konkret terhadap agenda Reformasi Birokrasi, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan tenaga pendidik. Tingginya capaian pada indikator kompetensi guru seperti 116% partisipasi pada pelatihan pembelajaran paradigma baru, 169% keterlibatan dalam inovasi pembelajaran, serta 266% partisipasi dalam program kepemimpinan sekolah menjadi bukti bahwa transformasi kompetensi berlangsung secara sistematis dan berdampak. Kinerja ini selaras dengan arah Reformasi Birokrasi yang menekankan peningkatan kapasitas SDM, profesionalitas, serta akselerasi kompetensi melalui program-program pelatihan yang adaptif, responsif, dan terukur.

Grafik 1.5 Capaian Kinerja BGTK Maluku Tahun 2024



Selain aspek kompetensi pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola organisasi yang menjadi pilar penting Reformasi Birokrasi. Predikat SAKIP “A” mencerminkan akuntabilitas kinerja yang kuat, sedangkan capaian nilai kinerja anggaran sebesar 95,69 menegaskan efektivitas perencanaan dan realisasi anggaran sesuai prinsip efisiensi dan transparansi. Capaian ini sejalan dengan indikator Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Renstra, termasuk Indeks Akuntabilitas Kinerja, Sistem Merit, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan capaian tersebut, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku telah memiliki modal organisasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi 2025–2029. Kinerja yang melampaui target pada aspek kompetensi guru dan tata kelola memperlihatkan kesiapan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku untuk menjalankan mandat peningkatan mutu layanan pendidikan secara profesional, adaptif, dan berorientasi hasil. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku sebagai unit yang mampu menjadi contoh penerapan tata kelola yang responsif, efektif, dan accountable dalam ekosistem Kemendikdasmen.

c. Implementasi Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendorong pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif, memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan inovasi daerah dapat berkembang sesuai kebutuhan lokal. Dengan otonomi daerah, kualitas dan daya saing pendidikan diharapkan meningkat, dan pelaksanaan visi serta misi pendidikan dapat berjalan lebih efektif. Otonomi juga meringankan beban pemerintah pusat karena kewenangan pengelolaan pendidikan dilimpahkan kepada pemerintah daerah.



a. Potensi

- (1) Pengelolaan sumber daya pendidikan lebih efektif, karena keputusan berada lebih dekat dengan satuan pendidikan dan sesuai kebutuhan lokal.
- (2) Daerah memiliki keleluasaan merancang strategi peningkatan mutu guru, termasuk pemetaan kebutuhan pelatihan, penataan formasi, dan penempatan guru.
- (3) Mendukung pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi GTK, seperti Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial, serta pelatihan bakal calon kepala sekolah.
- (4) Peluang inovasi pendidikan lebih besar, karena pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan peserta didik.

b. Permasalahan

- (1) Koordinasi lintas kewenangan pusat–provinsi–kabupaten/kota masih lemah, terutama terkait penataan guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Ketimpangan jumlah dan distribusi guru antarwilayah dan antarjenjang, menyebabkan pelaksanaan pelatihan tidak merata.
- (3) Daerah yang kekurangan guru kesulitan mengirim peserta pelatihan, karena beban mengajar tinggi dan guru tidak dapat meninggalkan sekolah.
- (4) Daerah yang kelebihan guru tidak selalu melakukan redistribusi secara efektif, sehingga ketidakseimbangan tetap berlanjut.
- (5) Hambatan fleksibilitas penempatan guru membuat beberapa program seperti Pembelajaran Mendalam dan Koding–AI belum menjangkau wilayah secara setara.
- (6) Keterbatasan kapasitas tata kelola pendidikan di beberapa daerah, sehingga otonomi tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas GTK.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemberdayaan pendidik serta tenaga kependidikan. Dalam menetapkan visi, BGTK Provinsi Maluku mengacu pada arah pembangunan pendidikan nasional dan selaras dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029.

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029 serta tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, maka Visi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang kompeten, profesional, berkarakter, dan adaptif berbasis kearifan lokal untuk mendukung pendidikan yang bermutu dan berkeadilan di seluruh wilayah Maluku”

Visi tersebut menggambarkan komitmen BGTK Provinsi Maluku dalam mendukung transformasi pendidikan melalui peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional serta karakteristik wilayah kepulauan Maluku.

Dalam mewujudkan visi tersebut, BGTK Provinsi Maluku melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berlandaskan nilai **Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH)** serta menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Sebagai UPT bidang guru dan tenaga kependidikan, BGTK Provinsi Maluku menjalankan fungsi



strategis berupa pemetaan kebutuhan dan kompetensi, pengembangan model peningkatan kompetensi, fasilitasi pengembangan profesional, supervisi, serta pemantauan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Karakteristik Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keberagaman kondisi geografis menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan layanan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu, BGTK Provinsi Maluku mengembangkan pendekatan yang adaptif, inovatif, dan berbasis kebutuhan wilayah agar layanan pengembangan dan pemberdayaan pendidik serta tenaga kependidikan dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara lebih efektif.

Pelaksanaan tugas BGTK Provinsi Maluku juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam memperkuat kolaborasi pendidikan. Nilai **Ale Rasa Beta Rasa** yang mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, serta prinsip keberlanjutan dalam nilai **Sasi**, menjadi inspirasi dalam membangun kemitraan, penguatan komunitas belajar, dan pengembangan layanan yang berbasis kebutuhan serta keberlanjutan.

Dengan mengintegrasikan mandat regulasi, karakteristik wilayah, dan nilai budaya lokal, BGTK Provinsi Maluku diarahkan menjadi penggerak pengembangan dan pemberdayaan pendidik serta tenaga kependidikan yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan terwujudnya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan relevan menuju Indonesia Emas 2045.

B. Misi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, melaksanakan misi Presiden dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemajuan kebudayaan yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dalam mendukung pelaksanaan agenda tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sistem pembelajaran yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran.
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang guru dan tenaga kependidikan, BGTK Provinsi Maluku memiliki



peran strategis dalam mendukung pencapaian misi Kementerian melalui pengembangan dan pemberdayaan pendidik serta tenaga kependidikan. Peran tersebut dilaksanakan melalui pemetaan kebutuhan dan kompetensi, pengembangan model peningkatan kompetensi, fasilitasi pengembangan profesional, pendampingan, supervisi, serta penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam kerangka pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, (Ditjen GTK), BGTK Provinsi Maluku berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter melalui penguatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan tata kelola kelembagaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Berdasarkan peran tersebut, serta berpedoman pada visi BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dan tugas serta fungsi kelembagaan sebagaimana diatur dalam, maka Misi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kebutuhan dan kompetensi.
2. Mengembangkan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan transformasi pendidikan serta karakteristik wilayah.
3. Meningkatkan kualitas layanan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung mutu pembelajaran.
4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis dalam pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Misi tersebut menjadi landasan strategis BGTK Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang guru dan tenaga kependidikan, melalui pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, guna mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia Emas 2045

C. Tujuan

Tujuan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai selama periode Renstra Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan memperhatikan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan



Menengah, sasaran program Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), serta tugas dan fungsi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang guru dan tenaga kependidikan.

Tujuan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pendidik serta tenaga kependidikan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter, BGTK Provinsi Maluku berperan dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui penyediaan layanan pengembangan kompetensi yang berbasis kebutuhan, kompetensi, dan karakteristik wilayah. Selain itu, BGTK Provinsi Maluku diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi kelembagaan, serta memperhatikan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan sasaran program Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), maka Tujuan dan Indikator Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal
2	Meningkatnya Kualitas tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku.	a. Nilai Kinerja Anggaran BGTK Provinsi Maluku. b. Predikat Akuntabilitas Kinerja BGTK Provinsi Maluku

Tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029



D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan merupakan hasil kinerja yang ditetapkan sebagai penjabaran tujuan organisasi dan menjadi fokus pencapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran Kegiatan juga berfungsi sebagai acuan dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku menetapkan dua Sasaran Kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan; dan (2) meningkatnya tata kelola Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku. Kedua Sasaran Kegiatan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan program dan pengukuran kinerja BGTK Provinsi Maluku selama periode 2025–2029.

Tabel 2.2 Tujuan , Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
2	Meningkatnya Kualitas tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku.	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku minimal A

Indikasi Risiko

Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian kinerja. Identifikasi indikasi risiko menjadi bagian dari pengendalian kinerja untuk mendukung penyusunan langkah mitigasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Indikasi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian Sasaran Kegiatan BGTK Provinsi Maluku disajikan sebagai berikut.



Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Resiko	Dampak Terhadap Kinerja	Rencana Mitigasi
1.	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Target layanan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan tidak tercapai.	Target capaian layanan pengembangan kompetensi GTK tidak terpenuhi dan pemerataan layanan menjadi terhambat.	Penerapan skema pelatihan luring, daring, dan hibrida serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
		Belum optimalnya pelibatan GTK di wilayah kepulauan dan 3T dalam program peningkatan kompetensi.	Pemerataan layanan pengembangan kompetensi GTK, khususnya di wilayah kepulauan dan 3T, tidak tercapai secara optimal.	Penyediaan kuota afirmasi dan pelaksanaan pelatihan berbasis klaster wilayah.
		Hasil pelatihan tidak terimplementasi secara optimal dalam praktik pembelajaran	Peningkatan kompetensi guru tidak memberikan dampak optimal terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.	Pelaksanaan pendampingan pascapelatihan, supervisi akademik, dan pemantauan implementasi hasil pelatihan.
		Hasil pelatihan dan praktik baik tidak terdiseminasi secara luas kepada GTK lainnya.	Manfaat program terbatas pada peserta pelatihan dan tidak mendorong peningkatan kapasitas GTK secara lebih luas.	Optimalisasi Komunitas Belajar (Kombel), KKG, dan MGMP sebagai wadah diseminasi dan berbagi praktik baik.
2	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku	Pencapaian kinerja anggaran tidak memenuhi target yang ditetapkan.	Efektivitas pelaksanaan program menurun dan target kinerja organisasi berpotensi tidak tercapai.	Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala.
		Perencanaan dan penganggaran belum mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.	Sumber daya tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga capaian program dan kinerja organisasi kurang maksimal.	Penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta reviu capaian program secara berkala.
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak mencapai target yang ditetapkan.	Akuntabilitas kinerja organisasi menurun dan berdampak pada penilaian kinerja instansi.	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai prinsip SAKIP.
		Hasil evaluasi dan pengawasan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan tata kelola dan kinerja organisasi.	Peluang perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi tidak dimanfaatkan secara optimal.	Pemanfaatan hasil evaluasi dan pengawasan sebagai dasar penyempurnaan tata kelola, pengambilan keputusan, dan perbaikan kinerja organisasi.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku mengacu pada arah dan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Ditjen GTK yaitu arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional 4 dan Prioritas Nasional 8. Dalam Prioritas Nasional 4, untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dalam program pembangunan adalah:



- a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- b. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- c. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
- d. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
- e. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam Prioritas Nasional 8, untuk mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju, arah kebijakan dan strategi dalam program pembangunan adalah pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. Sasaran Prioritas Nasional Ditjen GTK selaras dengan Prioritas Nasional 4, arah kebijakan dalam program pembangunan yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.

Prioritas Nasional :

Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Arah Kebijakan dan strategi Kemendikdasmen :

- (a) Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan
- (b) Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah
- (c) Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan
- (d) Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- (e) Peningkatan kualitas pendidikan vokasi
- (f) Pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan Bahasa Indonesia
- (g) Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan
- (h) Penguatan tatakelola serta akuntabilitas Kementerian

Guna mewujudkan guru dan tenaga kependidikan berkualitas, arah kebijakan Kemendikdasmen yang menjadi fokus utama Ditjen GTKPG antara lain : (1) Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan; (2) Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian.



Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Dirjen GTK Kemendikdasmen

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan	a. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. b. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i> (STEM), serta penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. c. Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas. b. Mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi, numerasi, sains, dan teknologi, pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, Pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah. c. Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV. d. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam e. peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong terwujudnya upaya positif dalam perbaikan kualitas belajar mengajar, dan kualitas satuan pendidikan secara menyeluruh. f. peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. g. pemberian perlindungan dan penghargaan yang layak bagi guru dan tenaga kependidikan h. penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat. i. penguatan pembelajaran kelas rangkap yang terutama dapat diterapkan pada kondisi satuan pendidikan dengan keterbatasan pendidik dan murid, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, serta memastikan keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, dengan mengedepankan ketercapaian pembelajaran berpusat pada anak.



Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian	a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong) b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah. c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.
--	--

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan yang ada Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun arah kebijakan dan strategi Balai yang selaras dengan Rencana Strategis Ditjen GTK Kemendikdasmen.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BGTK Provinsi Maluku .

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan kapasitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan	a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung transformasi pembelajaran dan pendidikan. b. Penguatan pengembangan pendidikan profesi, kualifikasi akademik, perlindungan, dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan pembelajaran dan manajerial satuan pendidikan d. Pemberdayaan komunitas belajar dan penguatan kemitraan dalam pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. e. Perluasan akses dan jangkauan layanan pengembangan serta pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang adaptif dan inovatif terhadap karakteristik wilayahh
Penguatan mutu layanan pembelajaran dan pendidikan berbasis kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	a. Peningkatan kualitas implementasi pembelajaran, kurikulum, dan penilaian pendidikan yang berpusat pada peserta didik. b. Penguatan pembelajaran literasi, numerasi, sains, teknologi, pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial. c. Penguatan pendidikan karakter, kesehatan sekolah, pendidikan inklusif, serta layanan bimbingan dan konseling. d. Pengembangan dan pemanfaatan bahan ajar, sumber belajar, dan teknologi digital untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran. e. Peningkatan pendampingan, supervisi akademik, dan evaluasi pembelajaran untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.
Penguatan tata kelola Balai yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi hasil	a. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan efisien b. Penguatan akuntabilitas dan perbaikan Kinerja balai secara berkelanjutan

Arah kebijakan dan strategi BGTK Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 merupakan penjabaran operasional arah kebijakan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi



Balai. Implementasinya difokuskan pada penguatan kapasitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi akademik, kepemimpinan pembelajaran, serta pemberdayaan komunitas belajar dan kemitraan.

Selain itu, dilakukan penguatan mutu layanan pembelajaran dan pendidikan melalui peningkatan kualitas implementasi pembelajaran, kurikulum, dan penilaian pendidikan, termasuk penguatan literasi, numerasi, sains dan teknologi, *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM), pembelajaran mendalam (*deep learning*), koding, kecerdasan artifisial, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, dan layanan bimbingan dan konseling.

Seluruh upaya tersebut didukung oleh penguatan tata kelola Balai yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi hasil melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian kinerja, dan akuntabilitas organisasi secara berkelanjutan.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi BGTK Provinsi Maluku memuat landasan hukum yang menjadi acuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta penyelenggaraan program dan layanan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah. Regulasi tersebut mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral yang ditetapkan Pemerintah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai rujukan dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional.

Kerangka regulasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BGTK Provinsi Maluku serta memastikan keselarasan program dan layanan di daerah dengan kebijakan pendidikan nasional dan menjadi dasar dalam menyesuaikan penyelenggaraan kegiatan terhadap perkembangan kebijakan pendidikan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK dapat berjalan efektif, akuntabel, adaptif, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan nasional. Rincian kerangka regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Maluku disajikan pada Lampiran 3.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. Kerangka kelembagaan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai GTK Provinsi Maluku

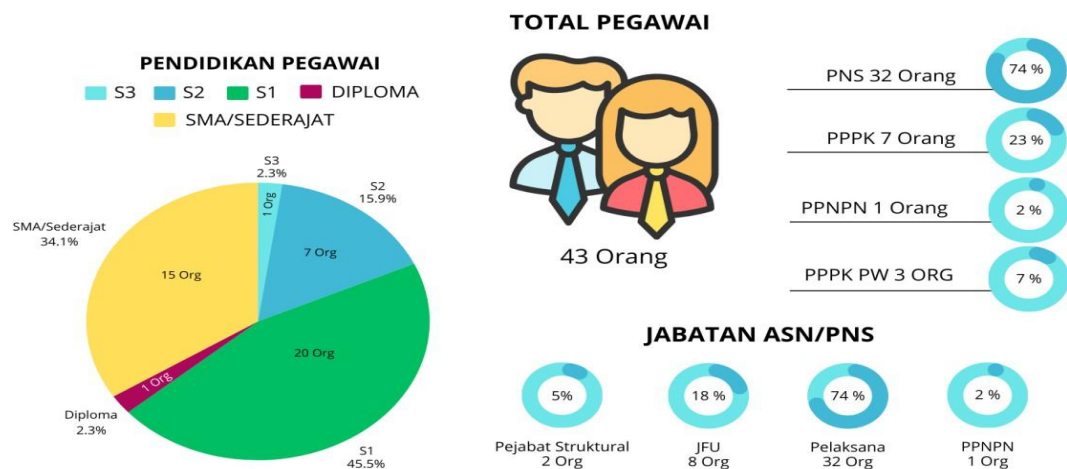
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sesuai arahan dari Dirjen GTKPG, Balai GTK Provinsi Maluku membentuk Tim Kerja.

Balai GTK Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai GTK Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
- b) pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
- c) pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
- d) pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
- e) pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
- g) pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan; dan
- h) pelaksanaan urusan administrasi

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pencapaian visi dan misi lembaga, yaitu menentukan keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang diamanahkan kepada lembaga. Pencapaian visi dan misi tersebut didukung dan dilaksanakan oleh pegawai di Balai GTK Provinsi Maluku yang berjumlah 43 orang dengan status PNS sejumlah 32 orang, PPPK sejumlah 7 orang, PPPK paruh waktu sejumlah 3 orang, dan PPNP sejumlah 1 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah PNS dan Non PNS tersebut memiliki latar belakang pendidikan mulai dari SMP hingga Strata.



Gambar 3.2 Komposisi Pegawai BGTK Maluku Tahun 2025

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen. Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi serta menjadikan indikator tersebut sebagai indikator kinerja Rencana Strategis 2025-2029, sehingga dapat menjadi kementerian dengan tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif.

Reformasi Birokrasi merupakan fondasi utama dalam penguatan tata kelola Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku untuk menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan, keterbatasan akses layanan, serta tuntutan peningkatan mutu pengembangan guru dan tenaga kependidikan yang merata dan berkelanjutan. Dalam



periode Renstra, kebijakan Reformasi Birokrasi Balai GTK Provinsi Maluku diarahkan pada enam pilar utama, yaitu:

- (1) penguatan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- (2) peningkatan profesionalisme SDM aparatur;
- (3) transformasi digital layanan pengembangan guru;
- (4) penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran;
- (5) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- (6) penguatan integritas melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada penataan kelembagaan dan prosedur layanan, pengembangan kompetensi widyaiswara dan fasilitator, digitalisasi sistem layanan pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi penerapan SAKIP berbasis *outcome*, penerapan standar pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian gratifikasi. Melalui implementasi Reformasi Birokrasi yang konsisten dan terarah, diharapkan terwujud BGTK Provinsi Maluku sebagai lembaga yang **profesional, modern, berintegritas, dan adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan**, sehingga mampu memberikan layanan pengembangan guru dan tenaga kependidikan yang lebih cepat, merata, berkualitas, dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Maluku.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam memastikan pencapaian tujuan Renstra BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 secara optimal, ditetapkan Sasaran Kegiatan sebagai tahapan pencapaian kinerja tahunan. Setiap Sasaran Kegiatan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Target kinerja tersebut menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan selama periode Renstra.

Tabel 4.1 Target Kinerja Balai GTK Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan						
IKK 1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Persen	1.63	1.79*)	1.88	2.02	2.17
SK.2	Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Maluku						
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Maluku	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Maluku	Predikat	A	A	A	A	A

*) Hasil Reviuw, Awal Tahun 2026

Target kinerja Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 diarahkan untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta memperkuat tata kelola organisasi. Pada Sasaran Kegiatan meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran ditargetkan meningkat dari 1,63 persen pada tahun 2025 menjadi 2,17 persen pada tahun 2029.



Pada Sasaran Kegiatan meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Maluku, target kinerja diarahkan pada pencapaian Nilai Kinerja Anggaran dengan predikat **Sangat Baik** dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat **A** selama periode Renstra.

Ketercapaian target kinerja tersebut didukung melalui pelaksanaan program Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selaras dengan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta kebutuhan pengembangan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku. Keterkaitan antara sasaran kegiatan, prioritas pembangunan pendidikan, dan program Ditjen GTKPG disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Keterkaitan Sasaran Kegiatan BGTK Provinsi Maluku dengan Prioritas Kemendikdasmen dan Program Ditjen GTK

Sasaran Kegiatan BGTK Provinsi Maluku	Prioritas Kemendikdasmen *)	Keterkaitan dengan Program Ditjen GTK*)
Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah	Guru Pendidikan Khusus (GPK) Inklusi; GTK yang Mendapatkan Pendampingan Pembelajaran; PKG Bimbingan dan Konseling bagi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK
	Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru	Diklat Berjenjang Guru PAUD; Program Kepemimpinan Sekolah; Pendidikan Profesi Guru (PPG); Afiriasi Kualifikasi S1/D-IV; Pengembangan Karier dan Penghargaan GTK; Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi	Peningkatan Kompetensi GTK untuk Inovasi Pembelajaran; PKG Bahasa Inggris; PKG MIPA/PISA
Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Maluku	Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

*) Data Renstra Dirjen GTKPG 2025-2029

Keterkaitan sasaran kegiatan BGTK Provinsi Maluku dengan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta program Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menunjukkan keselarasan pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan nasional. Dukungan terhadap pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan diwujudkan melalui program peningkatan kompetensi, kualifikasi, profesionalisme, kepemimpinan, pendidikan inklusif, serta penguatan literasi, numerasi, dan sains teknologi.



Dukungan terhadap peningkatan tata kelola BGTK Provinsi Maluku dilaksanakan melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang berfokus pada penguatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan kinerja, dan akuntabilitas organisasi. Keseluruhan program tersebut menjadi instrumen dalam mendukung pencapaian target kinerja BGTK Provinsi Maluku selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan pencapaian tujuan, sasaran target kinerja BGTK Provinsi Maluku yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan tujuan untuk menghitung indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kinerja balai selama lima tahun periode Renstra. Indikasi kebutuhan pendanaan Rencana Strategis BGTK Provinsi Maluku tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BGTK Provinsi Maluku
Tahun 2025 - 2029 (dalam ribuan rupiah)

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1 - Meningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan					
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	17.393.619.	16.819.335	18.501.268	20.351.394	22.386.533
SK.2 - Meningkatkan Tata Kelola Balai GTK Provinsi Maluku					
[IKK 2.1] Capaian NKA Balai GTK Provinsi Maluku	2.973.012	4.551.865	5.007.051	5.007.051	5.007.051
[IKK 2.2] Predikat AKIP Balai GTK Provinsi Maluku	2.383.044	89.984	98.982	108.880	119.768
Jumlah	22.749.645	21.461.184	23.607.301	25.467.325	27.513.352

Pagu anggaran tahun 2025 dan 2026 sebagaimana Tabel 4.3 di atas merupakan pagu anggaran yang diperoleh melalui aplikasi <https://sakti.kemenkeu.go.id/>, sehingga masih dimungkinkan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan hasil revisi anggaran. Pagu anggaran Tahun 2027–2029 disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan pendanaan dengan asumsi kenaikan sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya pada beberapa komponen anggaran. Besaran pagu tersebut bersifat indikatif dan akan disesuaikan lebih lanjut berdasarkan kebijakan penganggaran serta kebutuhan program



yang ditetapkan pada periode berjalan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam penyesuaian atau perubahan Renstra.

Indikasi kebutuhan pendanaan BGTK Provinsi Maluku Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Alokasi pendanaan diarahkan pada pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan serta penguatan tata kelola organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi BGTK Provinsi Maluku. Sebagian besar pendanaan dialokasikan untuk mendukung peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sedangkan pendanaan lainnya diarahkan untuk mendukung pengelolaan kinerja, pengelolaan anggaran, dan penguatan akuntabilitas organisasi. Kebutuhan pendanaan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target kinerja BGTK Provinsi Maluku selama periode Renstra Tahun 2025–2029.



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan di Provinsi Maluku. Penyusunannya didasarkan pada kebutuhan pembangunan pendidikan, karakteristik wilayah, serta dinamika kebijakan yang berkembang selama periode 2025–2029.

Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan kerangka pendanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi instrumen untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Implementasi Rencana Strategis ini diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan pengembangan dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan guna mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu, merata, dan inklusif di Provinsi Maluku. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan memerlukan dukungan, koordinasi, dan sinergi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan, serta penyelarasan dengan arah kebijakan pendidikan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional.



Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai GTK Provinsi Maluku

Kode	Progra./Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
138.03.DI 7614	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
SK. 1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan												
IKK.1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran		Persen	1.63	1.79	1.88	2.02	2.17	17.393.619.	16.819.335	18.501.268	20.351.394	22.386.533
138.03 WA	Program Dukungan Manajemen												
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru												
SK. 2	Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Maluku												
SK.2.1	Capaian NKA Balai GTK Provinsi Maluku		Predikat	SB	SB	SB	SB	SB	2.973.012	4.551.865	5.007.051	5.007.051	5.007.051
SK.2.1	Predikat AKIP Balai GTK Provinsi Maluku		Predikat	A	A	A	A	A	2.383.044	89.984	98.982	108.880	119.768
									22.749.645	21.461.184	23.607.301	25.467.325	27.513.352

Keterangan : SB = Sangat Baik



Lampiran 2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Balai GTK Provinsi Maluku

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi APBN (dalam jutaan rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam jutaan rupiah)					Total (dalam jutaan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1.63%	1.79%	1.88%	2.02%	2.17%	17.394	16.819	18.501	20.351	22.387	2.077					19.471				
SK.2 - Meningkatnya Tata Kelola Balai GTK Provinsi Maluku	[IKK 2.1] Capaian NKA Balai GTK Provinsi Maluku minimal sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	2.973	4.551	5.007	5.007	5.007										
	[IKK 2.2] Predikat AKIP Balai GTK Provinsi Maluku	A	A	A	A	A	2.383	89,98	98.98	109	119										



Lampiran 3 Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	a. Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. b. Rancangan sistematika RUU Sisdiknas akan memuat Ketentuan Umum, Pengelolaan Pendidikan, Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.	Tahun 2025-2026
2	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	a. Bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan visi “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, perlu dilakukan dengan pembelajaran yang adaptif dan bermakna melalui penerapan pembelajaran	Tahun 2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		mendalam, koding dan kecerdasan artifisial. b. Intervensi Dana BOSP Kinerja ditujukan pada satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial. c. Dana BOSP Kinerja yang ditujukan bagi satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sudah tidak menjadi sasaran seiring dengan kebijakan penghentian Program Sekolah Penggerak. d. Bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan Dana BOSP Reguler yang disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan kebijakan terkini.	
3	Perubaha Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	a. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek	Tahun 2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
		Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. b. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain: - Syarat bakal calon kepala sekolah - Penyiapan bakal calon kepala sekolah - Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah - Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah - Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah - Tugas dan beban kerja kepala sekolah - Pengembangan kompetensi kepala sekolah - Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri - Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah	
4	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan	a. Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan Profil Pelajar Pancasila menjadi profil lulusan.	Tahun 2025



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
	Jenjang Pendidikan Menengah	b. Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.	